



Analisis Framing Pemberitaan Persentase Kenaikan UMP DKI Jakarta pada Media Online Kompas.com dan CNN Indonesia.com

Fira Pebriyani¹, Hendra Setiawan²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 11 Februari 2023

Revised: 21 Februari 2023

Accepted: 3 Maret 2023

The increase in the percentage of UMP DKI Jakarta has been hotly discussed by people living in the capital city. There was resistance from various parties regarding the increase figure set by the government. Therefore, the researcher wants to know how the media Kompas.com and CNN Indonesia.com package the news about the increase in the percentage of UMP DKI Jakarta by using Zhongdang Pan and Kosicki's framing analysis theory. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques, namely reading and paying attention to news related to reporting on the percentage increase in UMP in DKI Jakarta on Kompas.com and CNN Indonesia.com media. This study found that the media analyzed by Kompas.com and CNN Indonesia.com had similarities and differences. The equation can be seen as a script structure which both are equipped with 5W+1H. The two media emphasize maximizing the government's role in making the decision to increase the DKI Jakarta UMP, it's just that Kompas.com media gives how the community or various parties respond to this policy. it's different, with CNN Indonesia which does not provide public opinion regarding policies, and focuses on the origins of calculating the DKI Jakarta UMP determination.

Keywords: Increase, Analysis, Reporting, DKI Jakarta UMP

(*) Corresponding Author: 1910631080075@student.unsika.ac.id

How to Cite: Pebriyani, F., & Setiawan, H. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Persentase Kenaikan UMP DKI Jakarta pada Media Online Kompas.com dan CNN Indonesia.com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 251-259. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7813501>

PENDAHULUAN

Fungsi utama dari pers di Indonesia ialah media penobar informasi. Informasi yang didapatkan dapat menyebabkan masyarakat menetapkan pilihan mengenai keputusan ataupun kebijakan dari sudut pandangnya. Informasi yang dimuat oleh pers tentunya telah melewati tahap seleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh reporter sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Frame yang digunakan dalam pesan dapat dikaji dengan analisis framing.

Pada tahun 1995, Baterson adalah orang yang pertama kali mencetuskan framing. Mulanya, frame dipahami sebagai struktur yang digunakan untuk memahami politik, kebijakan, dan wacana untuk membantu kita memahami bagaimana sesuatu terjadi di dunia nyata. Kemudian, konsep terus dikembangkan oleh Gofman pada 1974 yang memahami frame sebagai perilaku yang menggiring individu dalam menafsirkan realita menggunakan sudut pandang. (Fauzi, 2007:29) menggambarkan proses pembingkai media massa sebagai berita ketika informasi dalam beberapa hal menjadi ajang pertarungan simbolik antara pihak-pihak yang ingin pandangannya didukung oleh pembaca.



Pada hakikatnya, framing dapat dipahami dengan melihat bagaimana cara sebuah media menguraikan sebuah fenomena atau kasus yang terjadi di lapangan kemudian dimuat dalam sebuah cerita. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya membuktikan bahwa analisis framing telah banyak diaplikasikan oleh peneliti guna mengkaji berita dan jurnalistik terkait perannya dalam membangun interpretasi media tentang realita di lapangan serta pengaruhnya terhadap pembaca. Analisis framing merupakan pendekatan teoritis yang dapat digunakan dalam studi komunikasi, gerakan sosial, politik, dan lain sebagainya. Pada era saat ini media massa dapat dijangkau oleh siapapun dengan mudah melalui media massa baik dalam bentuk cetak maupun *online*.

Belakangan ini, masyarakat sedang dihebohkan dengan pemberitaan mengenai kenaikan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan UMP mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Seperti masyarakat ibu kota menolak angka kenaikan UMP DKI Jakarta karena berpikir angka tersebut dinilai tidak peduli dan berempati pada masyarakat kecil karena dinilai masih dibawah inflasi nasional. Penolakan tersebut tentunya bukan tanpa sebab, bantak masyarakat menolak dengan beberapa pertimbangan. Kenaikan persentase UMP DKI Jakarta dinilai masyarakat belum dapat memenuhi kehidupan sehari-hari untuk bertahan hidup di ibu kota. Selain itu, UMP DKI Jakarta juga mendapatkan penolakan dari pengusaha, akan tetapi pemerintah menanggapi bahwasanya angka kenaikan UMP DKI Jakarta ini sudah tepat. Sebab, sudah dikaji dan dilakukan survey sebelum memutuskan angka kenaikan tersebut.

Fokus penelitian ini ialah menganalisis struktur dan framing menggunakan teori Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada media *online* Kompas.com dan CNN Indonesia.com. Kedua media yang dipilih peneliti, sama-sama mengangakat berita terkait kenaikan persentase UMP DKI Jakarta. Dengan hasil akhir, peneliti dapat mengetahui bagaimana pengemasan berita yang disajikan anatar masing-masing media. Sebab, setiap media memiliki caranya masing-masing dalam membangun realitas berita, guna memperoleh masyarakat agar sepaham dengan pandangannya. Oleh sebab itu, tak heran apabila orang-orang memiliki persepsi berbeda tentang kasus yang serupa.

METODE

Peneliti menerapkan metode jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis guna mendeskripsikan karakteristik pemberitaan media Kompas.com dengan CNN Indonesia.com. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan memilih beberapa berita yang faktual dan valid disertai nama penulis, editor maupun redaksinya sehingga diharapkan data lebih sah dan dapat dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih satu berita dari dua media yaitu Kompas.com dan CNN Indonesia.com yang sama-sama menangkat topik mengenai persentase kenaikan UMP di DKI Jakarta.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan teknik membaca dan mencermati seksama isi berita terkait pemberitaan persentase kenaikan UMP di DKI Jakarta pada media Kompas.com dan CNN Indonesia.com. Selanjutnya, data dari media dianalisis menggunakan teori Pan dan Kosick dengan membandingkan dua berita dengan topik yang sama tetapi di media yang berbeda. Jumlah data yang dianalisis adalah satu berita dari masing-masing media.

Analisis Data

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS (cara wartawan menyusun kata)	1. Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
SKRIP (cara wartawan mengisahkan fakta)	2. Kelengkapan Berita	5W+1H
TEMATIK (cara wartawan menulis fakta)	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, preposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
TRETORIS (cara wartawan menemukan fakta)	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis framing dilakukan untuk beberapa artikel berita dari Kompas.com dan CNN Indonesia.com terkait kebijakan “Kenaikan Persentase UMP di DKI Jakarta”. Dengan menerapkan teori Pan dan Kosicki, penelitian ini berupaya mengetahui bagaimana pembingkaiian topik disajikan oleh masing-masing media.



Judul : UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, tetapi Ditolak Pengusaha dan Buruh

Sumber : Kompas.com

Ringkasan :Pemprov DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI menjadi sebesar Rp 4,9 juta. Artinya, UMP DKI 2023 naik sebesar 5,6 persen dibandingkan UMP DKI 2022. Penetapan UMP DKI 2023 itu diputuskan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022.

Analisis:

1. Struktur Sintaksis

Judul dan lead berita ini sudah cukup mengilustrasikan keseluruhan berita yang hendak diutarakan yaitu terkait kenaikan UMP di Jakarta yang mendapatkan penolakan dari beberapa pihak, baik itu pengusaha dan buruh. Terdapat kutipan dan sumber mengenai alasan penolakan kenaikan persentase UMR DKI Jakarta oleh buruh yang dijelaskan secara rinci berdasarkan anggaran pengeluaran buruh untuk hidup di ibu kota Jakarta.

2. Struktur Skrip

Sebuah berita tentu didalamnya memuat informasi penting, contohnya seperti berita mengenai bagaimana kenaikan persentase UMR DKI Jakarta serta siapa yang memutuskan dan menolak adanya kenaikan persentase UMR DKI Jakarta, seperti headline yang terlihat di awal. Sebagai konsumsi khalayak umum, di dalam berita ini secara analisis skrip telah terpenuhi meliputi 5W+1H, yang mencakup:

- **Who (Siapa)**

Siapa yang menolak adanya kenaikan persentase UMP DKI Jakarta?

Asosiasi Pengusaha Indonesia dan buruh menolak adanya kenaikan persentase UMP DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah.

- **When (Kapan)**

Kapan penetapan kenaikan UMP di putuskan?

Penetapan UMP DKI 2023 itu diputuskan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2022.

- **Where (Dimana)**

Dimana dicetuskan adanya kenaikan UMP naik menjadi 4,9 juta?

Usai rapat pimpinan di Balai Rung Balai Kota Andri Yansyah Kota DKI Jakarta menyebutkan terjadinya kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 4,9 juta.

- **Why (Mengapa)**

Mengapa kenaikan persentase UMP DKI Jakarta ditolak oleh beberapa pihak?

Buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta sebab dinilai tidak peduli dan berempati memberikan kenaikan dibawah inflasi nasional. Selain itu, angka tersebut dinilai belum dapat memenuhi keseharian untuk hidup di ibu kota.

- **How (Bagaimana)**

Bagaimana tanggapan buruh dan pengusaha mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta?

Buruh tetap mendesak agar UMP DKI direvisi naik menjadi sebesar 10,55 persen sebagai jalan kompromi dari serikat buruh yang sebelumnya mengusulkan kenaikan 13 persen. Sedangkan Apindo sebagai pengusaha tetap mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2022 dalam menentukan nilai UMP DKI Jakarta 2023.

Berdasarkan analisis struktur skrip, berita ini layak dikonsumsi oleh masyarakat, karena peristiwa disusun dengan terstruktur dan memenuhi 5W+1H.

3. Struktur Tematik

Berita ini ditulis berdasarkan pernyataan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai kenaikan UMP di DKI Jakarta sebesar Rp. 4,9 juta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1153 tahun 2022. Selain itu, keputusan tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak. Apindo menegaskan akan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan untuk menentukan nilai UMP DKI tahun depan, sebab diawal hanya menginginkan kenaikan UMP DKI Jakarta hanya 2,62 persen dan menolak kenaikan 5,6 persen. Lain halnya dengan penolakan buruh mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen, sebab dinilai tidak peduli dan berempati memberikan kenaikan dibawah inflasi nasional.

4. Struktur Retoris

Foto yang dimuat dalam berita sebagai informasi tambahan dalam mendukung isi berita keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta yang naik menjadi Rp. 4,9 juta yang diungkapkan Andri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi usai menjalani rapat di Balairung Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, dalam struktur retorik pada isi berita ini, disajikan secara keseluruhan mengenai bahasan terkait adanya keputusan Gubernur tentang kenaikan persentase UMP DKI Jakarta yang mengalami penolakan dari berbagai pihak di dukung dengan alasan pihak tersebut.

Home > Ekonomi > Makro

UMP DKI Jakarta Naik 5,6 Persen Jadi Rp4,9 Juta

CNN Indonesia

Senin, 28 Nov 2022 14:18 WIB



Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) naik 5,6 persen menjadi sebesar Rp4,9 juta pada 2023. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).

Judul : UMP DKI Jakarta Naik 5,6 Persen Jadi Rp. 4,9 Juta

Sumber : CNN Indonesia.com

Ringkasan : Pemprov DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI

tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

1. Struktur Sitaksis

Judul yang digunakan CCN dalam berita ini mampu menyampaikan isi berita mengenai kenaikan persentase UMP di DKI Jakarta. Lead menampilkan angka berupa persentase dan nominal gaji UMP DKI Jakarta. Isi berita juga menampilkan pendapat narasumber mengenai kajian serta kepastian adanya kenaikan UMP DKI Jakarta.

2. Struktur Skrip

Sebagai sebuah berita yang didalamnya memuat informasi penting khususnya dalam berita ini mengenai bagaimana kenaikan persentase UMP DKI Jakarta serta siapa yang memutuskan kenaikan persentase UMP DKI Jakarta, seperti headline yang terlihat di awal. Sebagai konsumsi khalayak umum, di dalam berita ini secara analisis skrip telah lengkap meliputi 5W+1H, yang mencakup:

- Who (Siapa)

Siapa yang menetapkan adanya kenaikan persentase UMP DKI Jakarta?
Pemprov DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan.

- Whan (Kapan)

Kapan dilakukan pertimbangan mengenai kenaikan UMP?
Andi mengungkapkan besaran UMP 2023 mempertimbangkan usulan Sidang Dewan Pengupahan pada Selasa (22/11) yang dihadiri oleh berbagai pihak berkepentingan

- Where (Dimana)

Dimana diungkapkan kepastian adanya kenaikan UMP DKI Jakarta?
Kenaikan UMP DKI Jakarta diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta.

- Why (Mengapa)

Mengapa kenaikan persentase UMP DKI Jakarta ditetapkan dengan persentase 5,6 persen?
Kenaikan persentase UMP DKI Jakarta telah melewati kajian, survei sehingga ketemu 5,6 persen atau alfa 0,2. Andri menjelaskan besaran UMP 2023 itu sesuai formula Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

- How (Bagaimana)

Bagaimana tanggapan terkait kenaikan UMP DKI Jakarta?
Kenaikan UMP 2023 itu diterima pengusaha setelah pada sidang gugatan di tingkat banding oleh Pemprov DKI era eks Gubernur Anies Baswedan kalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Berdasarkan analisis struktur skrip, berita ini layak dikonsumsi oleh masyarakat, karena peristiwa disusun dengan terstruktur dan memenuhi 5W+1H.

3. Struktur Tematik

Berita dimuat berdasarkan pernyataan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah dengan memastikan kenaikan UMP DKI Jakarta naik sebesar 5,6 persen. Selain itu, penetapan UMP ini juga mempertimbangkan usulan Sidang Dewan Pengupahan oleh berbagai

pihak kepentingan. Adanya kenaikan UMP ini juga telah melewati kajian dan survei yang dilakukan sebelumnya.

4. Struktur Retoris

Foto yang disediakan dalam berita bertujuan sebagai informasi tambahan, akan tetapi dalam berita ini foto yang tertera dapat dikatakan cukup mendukung dengan judul berita. Berita ini berbicara terkait kenaikan persentase UMP DKI Jakarta, sejalan dengan ilustrasi difoto yang menggambarkan aktivitas orang-orang yang kemungkinan sedang berangkat bekerja menyusuri jalan ibu kota DKI Jakarta.

Framing Pemberitaan Kompas.com

Setelah dilakukan analisis oleh peneliti, dapat diuraikan mengenai bagaimana Kompas.com memaknai dan mengemas fakta yang terjadi terkait kenaikan UMP DKI Jakarta yang ditolak oleh berbagai pihak yaitu buruh dan pengusaha dengan berbagai alasan dari masing-masing pandangan yang dijelaskan secara rinci. Hasil rekonstruksi pada pemberitaan media Kompas.com yaitu membangun opini masyarakat dan memberikan pernyataan yang mampu membuka pikiran mengenai pandangan alasan dari berbagai pihak dalam menolak kenaikan UMP DKI Jakarta. Dari pemberitaan ini masyarakat sadar bahwa penolakan yang terjadi bukan semata-mata tanpa alasan melainkan terdapat pertimbangan di dalamnya. Seperti alasan buruh menolak adanya kenaikan persentase UMP DKI Jakarta dengan alasan dinilai tidak peduli dan berempati memberikan kenaikan dibawah inflasi nasional, tentunya hal ini melalui perhitungan pengeluaran pokok yang dikeluarkan buruh atau masyarakat ketika hidup di DKI Jakarta. Kemudian Apindo atau pengusaha yang menolak adanya kenaikan UMP DKI Jakarta 5,6 persen dan mengharapkan kenaikan hanya 2,62 persen. Dengan adanya pemberitaan ini masyarakat dapat menyadari bahwa tuntutan kenaikan UMP DKI Jakarta oleh pengusaha menunjukkan angka lebih rendah dari yang diajukan pemerintah sebelumnya, hal ini menyadari bahwasanya angka persentase yang ditunjuk pengusaha lebih dinilai tidak layak bagi kehidupan sehari-sehari yang dikeluarkan oleh masyarakat terutama buruh di DKI Jakarta. Pemberitaan ini memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa dalam suatu perhitungan khususnya penetapan kenaikan persentase UMP menghasilkan pro kontra dengan berbagai pandangan dan alasannya.

Framing Pemberitaan CNN Indonesia.com

Hasil rekonstruksi media CNN Indonesia.com dalam pemberitaan “UMP Jakarta Naik” yaitu tidak ditemukan adanya keterpihakan. Dalam pemberitaan ini ditemukan kenaikan UMP tentu telah melewati kajian dan survey sebelumnya. Selain itu, dalam menentukan kenaikan UMP dilibatkan berbagai pihak di dalamnya seperti Sidang Dewan Pengupaha, Apindo, Kadin DKI, dan lain-lain. Penentuan kenaikan UMP juga telah melewati sidang yang dihadiri pakar, akademisi, praktisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, penghitungan UMP 2023 juga menggunakan acuan UMP 2022 atau tahun berjalan yakni Rp4,6 juta, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 sebesar Rp4,6 juta era eks Gubernur Anies Baswedan. Dalam pemberitaan ini,

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah telah memastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis framing mengenai berita Kenaikan Persentase UMP DKI Jakarta di media *online* Kompas.com dan CNN Indonesia.com dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berita Kenaikan persentase UMP DKI Jakarta merupakan hasil rekonstruksi wartawan pada kedua media *online* yang berbeda yaitu Kompas.com dan CNN Indonesia.com. Hasil rekonstruksi terlihat bahwa sikap Kompas.com dalam berita mengedepankan sisi human interest dari berbagai pihak terkhusus pada buruh. Terlihat dari bagaimana kutipan narasumber menjelaskan alasan penolakan kenaikan persentase UMP DKI Jakarta dengan terperinci. Mulai perhitungan pengeluaran sehari-hari hingga penilaian kenaikan UMP dinilai tidak peduli dan berempati memberikan kenaikan dibawah inflasi nasional. Terlihat bagaimana Kompas.com mengemas berita dengan sudut pandang dari beberapa pihak mengenai alasan penolakan kenaikan persentase UMP DKI Jakarta (berita tanggal 29 November 2022) dan narasumber yang digunakan Kompas dari beberapa pihak yaitu Dinaskertransgi dan Buruh. CNN Indonesia.com tidak mengungkapkan adanya penolakan dalam pemberitaan kenaikan UMP DKI Jakarta, hanya saja menampilkan bagaimana adanya penetapan angka tersebut melalui pertimbangan dan beberapa alasan dari sudut pandang pemerintah.
2. Setelah dilakukan analisis oleh peneliti, dapat disimpulkan media Kompas.com dan CNN Indonesia.com memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dapat ditemukan seperti struktur skrip yang keduanya dilengkapi dengan 5W+1H. Kedua media menekankan pada maksimalisasi peran pemerintah dalam pengamnilan keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta, hanya saja dalam media Kompas.com memmberikan bagaimana tanggapan masyarakat atau berbagai pihak terkait kebijakan ini. lain halnya, dengan CNN Indonesia yang tidak memberikan tanggapan masyarakat terkait kebijakan, dan fokus terhadap asal muasal perhitungan ketetapan UMP DKI Jakarta hingga telah dilakukan keputusan akhir yang dinilai telah disetujui oleh berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q., & Setiawan, H. (2021). *Analisis Struktur dan Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Mengenai Berita Mensos Risma Menanggapi Kasus Pelecehan Anak Panti Asuhan Malang Media Online CNN Indonesia dan Kompas.com*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9623-9629.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Harnia, N. T., Melisanti, F., & Setiawan, H. (2021). *Analisis Framing Berita Perundangan pada Media Online Detik.Com dan Tribunnnews.Com*

sebagai Bahan Ajar Teks Berita di SMP. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(5), 3145-3153.

Sinaga, K. C. S., & Nasution, B. (2016). *Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka.com* (Doctoral dissertation, Riau University).

Suryawati, I. (2014). *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Widarmanto, T. (2017). *Pengantar Jurnalistik Panduan Awal Penulis dan Jurnalis*. Yogyakarta: Araska.

Sumber lain:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/29/05404691/ump-dki-2023-naik-jadi-rp-49-juta-tetapi-ditolak-pengusaha-dan-buruh?page=all>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221128140728-532-879753/ump-dki-jakarta-naik-56-persen-jadi-rp49-juta>